



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PEMBERDAYAAN
PERMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

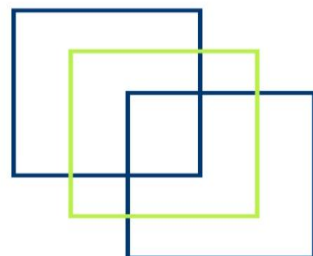
**POHON KINERJA
TAHUN 2026**



Jl. Jend. Sudirman, Tungkal IV Desa, Kec. Tungkal
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
36514



<https://p3ap2kb.tanjabbarkab.go.id/>



POHONI KINERJAA

DINAS: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN LAIN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ANA
KAB. TANJUNGJABUNG BARAT

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius,Kompetitif, Aman Harmonis,Mandiri dan Inovatif (Berkah Madani)

MISI 1.Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif

MISI 2 : Berkah Dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

TUJUAN 1 : Terwujudnya Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesenjangan Gender
TUJUAN 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarananya
Sasaran 3 : Meningkatkan Kesenjangan Gender

Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak

IK 1. Indeks Ketimpangan Gender 2.Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender 3.Indeks Perlindungan Anak 4.Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 5.Angka Perceraian

RPJMD

KINERJA STRATEGIK

KINERJA TAKTIKAL

KINERJA OPERASIONAL

Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam penyelenggaraan Anggaran Responsif Gender
IK Persentase Anggaran Responsif Gender
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Meningkatnya kelembagaan PUG di Kabupaten Tanjab Barat
IK Jumlah Kelembagaan PUG

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota
IK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota
IK Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG

Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
IK Jumlah perempuan yang berperan/ partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
IK Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Meningkatnya lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan
IK Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
IK Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi

Terjaminnya pemenuhan Hak Anak secara komprehensif
IK Persentase pemenuhan hak anak yang terpenuhi

Meningkatnya Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah
IK Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media
IK Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
IK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
IK Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan

Terlaksananya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
IK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
IK Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
IK Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif

Tersedianya Layanan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan
IK Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
IK Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan

Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi
IK Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Keluarga
IK Persentase Peningkatan kualitas keluarga

Terlaksananya kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan kesetaraan gender
IK Jumlah Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui kG

Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
IK Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) : Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia

Meningkatnya Pencegahan dan dan Penanganan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
IK ; Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan

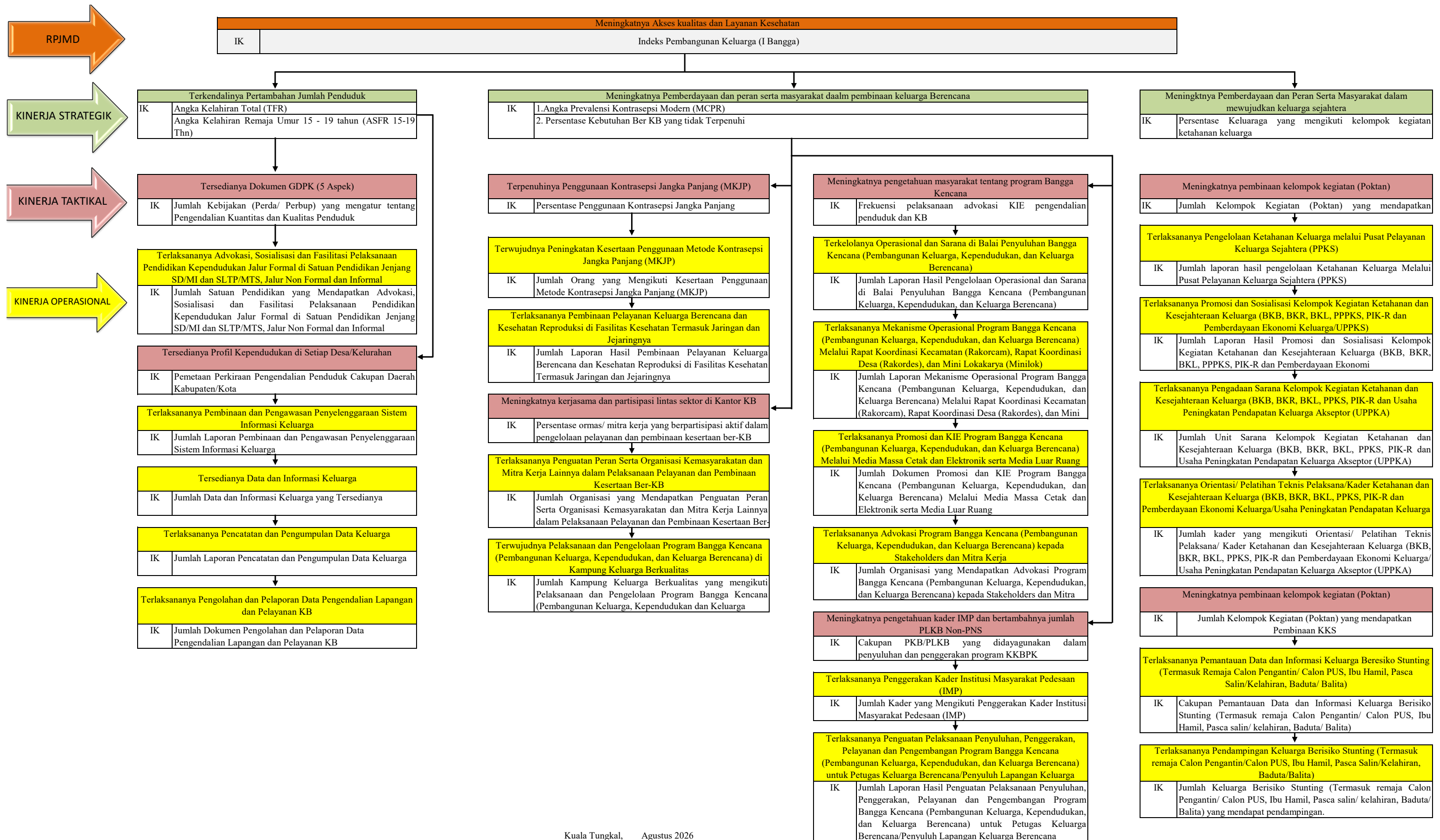
Terlaksananya pelayanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus
IK Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat Layanan

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus tingkat Daerah Kab/Kota
IK Jumlah APMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan

Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif
IK Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan

Tersedianya lembaga penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus
IK Jumlah lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK
IK Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK



Kuala Tungkal, Agustus 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ATINA DEWIANA, S.Pd
Pembina
NIP. 19721030 199203 2 004